

ABSTRAK

Tesis ini berjudul Penetapan Perwalian Anak Akibat dari Perkawinan Campuran Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dalam Perspektif *Maqashid Syariah*. Latar belakang dari penulisan tesis ini adalah adanya ketentuan yang mengharuskan wali anak berkewarganegaraan Indonesia, akan tetapi anak yang berkewarganegaraan ganda yang memiliki keluarga dan saudara yang tidak berkewarganegaraan Indonesia tidak punya hak untuk menjadi wali anak karena terhalang ketentuan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua pokok permasalahan yaitu (a) Status perwalian anak akibat dari perkawinan campuran pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dalam perspektif *maqashid syariah* dan (b) Ratio legis kesamaan Warga Negara dalam perwalian anak hasil perkawinan campuran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dimana tipe ini digunakan untuk mendapatkan suatu konsep yang jelas dan lengkap dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan dan juga buku-buku mengenai teori-teori terkait permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yang digunakan untuk mengkaji segala Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai ketentuan perwalian anak dan kewarganegaraan di Indonesia. Selanjutnya Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang diperoleh dari buku literatur, artikel dan karya ilmiah yang terkait dengan pokok permasalahan dalam tesis ini, dan yang terakhir Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Perwalian Anak, Kewarganegaraan Indonesia, Kewarganegaraan Ganda.

ABSTRACT

This thesis was entitled by Establishment of Children Guardianship from Blended Marriage Since the Legalization of Government Regulations Number 29 Year 2019 About the Term and The Rule for Designation of Guardian in the Perspective Sight of *Maqashid Syariah*. In the background of study, we focus on the policy which determined that the guardian should be Indonesian Native people, however, the children who gained of double national citizenship has family and siblings who did not gain of Indonesia national citizenship, they are not having the rights to become guardian for this children due to the policy. In this study, there are two main conflicts; (a) the status of children guardianship from blended marriage since the legalization of government regulations number 29 year 2019 about the term and the rule for designation of guardian in the perspective sight of *Maqashid Syariah*, and (b) similarity ratio of citizenship in children guardianship from blended marriage referred to government regulations number 29 year 2019 about the term and the rule for designation of guardian. The type of research in this study is using normative law research, where this type was used for getting the clear and the complete idea by doing examination to the statute laws and the theoretically books related to the conflicts which is shown up by the author. Problem approachment used in this study is *Statute Approach* that was used to examine all the statute laws which is controlling the regulation of children guardianship and citizenship in Indonesia. Next, *Conceptual Approach* coming from viewpoints and doctrines, which is developed in jurisprudence, was gained from the literature references, article, and scientific research related to the main conflict in this thesis. The last, *Case Approach*, that was carried out by doing observation to the cases related to the problem issue that was faced and has become verdict, has permanent legal force.

Keywords : Children Guardianship, Indonesia Citizenship, Double Citizenship.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel I | |
| Syarat-Syarat Menjadi Wali dalam Perwalian | 18 |
| Tabel II | |
| Syarat-Syarat Menjadi Wali dalam Perwalian | 49 |